

Humphrey Wangke

# **TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDONESIA**



Diterbitkan oleh:  
P3DI Setjen DPR Republik Indonesia  
dan Azza Grafika  
2013



**Judul:**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya terhadap Indonesia

**Perpustakaan Nasional:**

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

xi+262 hlm.; 17x24 cm

ISBN: 978-979-9052-96-4

Cetakan Pertama, 2013

**Penulis:**

Lisbet

Humphrey Wangke

Adirini Pujayanti

Lukman Adam

Dina Martiany

Dinar Wahyuni

Mohammad Teja

Teddy Prasetiawan

Sita Hidriyah

**Editor:**

Humphrey Wangke

**Desain Sampul:**

Fery C. Syifa

**Tata Letak:**

Zaki

**Diterbitkan oleh:**

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)

Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

**Bersama:**

Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012

**Kantor Pusat:**

Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta

Telp. +62 274-6882748

**Perwakilan Jabodetabek:**

Graha Azza Grafika Perumahan Alam Asri

B-1 No. 14 Serua Bojongsari Kota Depok 16520

Telp. +62 21-49116822

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72****Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## KATA PENGANTAR

Dipilihnya *SDGs (Sustainable Development Goals)* sebagai pengganti *MDGs (Millennium Development Goals)* karena daya dukung alam terhadap kehidupan manusia semakin menurun sehingga perlu penyelamatan. Penurunan daya dukung alam itu seperti jumlah penduduk dunia yang terus meningkat dari 4 miliar menjadi 7 miliar, akan meningkatkan penggunaan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Peningkatan pemanfaatan SDA ini yang dkuatirkan akan merusak lebih jauh lautan dan daratan sebagai sumber nutrisi manusia. Kebutuhan manusia akan bahan pangan, energi dan kebutuhan lainnya yang berasal dari hutan terus meningkat sejak tahun 2007. Kehidupan penduduk lokal, terutama yang berada di sekitar pantai dan hutan, terancam oleh bahaya banjir dan kekeringan. Karena itu, muncul kesadaran baru diantara negara-negara di dunia bahwa pola produksi dan konsumsi yang selama ini terjadi, dilihat dari sisi lingkungan, tidak berkelanjutan.

Ide atau gagasan tentang *SDGs* pertama kali disampaikan oleh pemerintah Kolombia dan Guatemala dalam pertemuan tidak resmi di Solo, Indonesia, Juli 2011. Usulan ini terus bergulir dan menjadi perdebatan di kalangan anggota PBB dalam berbagai pertemuan tidak resmi untuk menyempurnakan usulan tersebut. Laporan Sekjen PBB yang dipersiapkan oleh Panel Tingkat Tinggi tentang Keberlanjutan Global juga memberikan dukungan yang signifikan terhadap *SDGs*. Di dalam usulannya, kedua negara menyebutkan ada 7 tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu:

1. *Combating Poverty*
2. *Changing Consumption Patterns*
3. *Promoting Sustainable Human Settlement Development*
4. *Biodiversity and Forests*
5. *Oceans*
6. *Water Resources*
7. *Advancing Food Security*
8. *Energy, including from renewable sources*

Karena terdiri dari 8 tujuan maka setiap negara dapat menentukan bagian mana yang perlu mendapat prioritas agar tercipta keseimbangan antara

pertumbuhan ekonomi, sosial dan perlindungan lingkungan hidup. Melalui *SDGs* umat manusia diingatkan kembali akan tanggung jawabnya terhadap sebuah proses yang telah dimulai 20 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1992, ketika disepakati tentang Deklarasi Rio dengan Agenda 21 tentang pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2002 disepakati Rio+10 yang menyepakati *Plan of Implementation*, dan di tahun 2012 negara-negara di dunia kembali bersepakat untuk menentukan sebuah tujuan yang sebenarnya sudah dirumuskan 20 tahun yang lalu. Jika *MDGs* hanya diimplementasikan di negara-negara berkembang saja, maka *SDGs* akan diterapkan di semua negara di dunia.

Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga pilar penting yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang harus dijalankan secara terintegrasi. Pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan tidak diartikan secara sempit sebagai perlindungan lingkungan tetapi pemahaman tentang keterkaitan antara ekonomi, sosial dan lingkungan alam. Munculnya masalah ketersediaan bahan pangan, air, tanah dan energi merupakan akibat dari tindakan manusia yang melakukan eksploitasi secara berlebihan. Melalui konsep pembangunan berkelanjutan, maka pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara hati-hati agar generasi yang akan datang tetap dapat, menikmati kekayaan alam tersebut.

Masalah pembangunan berkelanjutan terkait dengan kemajuan pesat yang dicapai dalam pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun sayangnya semuanya itu diiringi oleh kemunduran kemampuan sumberdaya alam seperti air, tanah, dan hutan dan terkurasnya sumberdaya alam seperti perikanan, pertambangan, minyak dan mineral lainnya. Pelaksanaan pembangunan juga menghasilkan produk sampingan seperti limbah, sampah, dan buangan baik dalam bentuk padat, cair, gas, maupun tingkat tekanan dan kebisingan. Yang perlu dijaga adalah agar hasil-hasil sampingan tersebut tidak melampaui ambang batas dan daya dukung lingkungan.

Jika daya tampung lingkungan terlampaui, maka struktur dan fungsi dasar ekosistem sebagai penunjang kehidupan akan rusak dan keberlanjutan fungsi lingkungan terganggu. Keadaan itu akan menjadi beban lingkungan dan sosial yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintahlah yang harus menanggung beban pemulihannya. Oleh karena itu, pendayagunaan sumberdaya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal dan bertanggungjawab serta sesuai dengan kemampuan daya dukungnya serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan.

Dalam kaitan dengan 8 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, peneliti P3DI Sekretariat Jenderal DPRRI menulis buku dengan judul Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya Terhadap Indonesia. Tulisan-tulisan ini secara metodologis terbagi dua, yaitu bagian pertama, kedua, dan ketiga merupakan hasil penelitian lapangan di Provinsi Aceh dan Kalimantan Tengah. Sedangkan pada bagian ke-4 sampai dengan bagian ke-8 merupakan hasil kajian perpustakaan. Ke-8 tulisan ini menganalisis secara rinci tentang implikasi yang harus dilakukan terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dimaksud.

Pada bagian *pertama* dari buku ini, Lisbet membahas energi baru terbarukan. Sektor ini menjadi sangat penting dalam SDGs karena Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SU PBB) tanggal 16 Januari 2012 telah menetapkan tahun 2012 sebagai tahun energi terbarukan internasional. Peningkatan kepedulian masyarakat internasional terhadap isu energi karena didasari oleh keinginan untuk dapat terus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera. Indonesia termasuk salah satu negara yang harus dapat memanfaatkan potensi sumberdaya energi baru terbarukan yang dimilikinya. Akan tetapi mengingat keterbatasan sumber dana, teknologi dan sumberdaya manusia, Indonesia masih membutuhkan kerjasama luar negeri untuk mengeksploitir potensi yang dimilikinya.

Pada bagian *kedua*, Humphrey Wangke menulis tentang pengelolaan hutan secara berkelanjutan di Indonesia yang menghadapi dua tantangan besar yaitu kemiskinan dan jumlah penduduk yang terus meningkat. Kedua hal ini telah mendorong terjadinya deforestasi dan degradasi lahan. Untuk menyelamatkan hutan Indonesia yang kaya akan keanekaragaman flora fauna, penulis mengusulkan perlunya kerjasama yang terintegrasi pada tingkat lokal, nasional, regional dan global. Baik negara maju maupun negara berkembang harus mampu mengembangkan kerjasama untuk mengatasi masalah pembangunan berkelanjutan. Demikian pula dengan kalangan pengusaha dan LSM harus mampu bekerja untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Semua *stakeholder* harus mengambil tindakan yang tepat dan membentuk basis bagi kemitraan internasional.

Pada bagian *ketiga*, Adirini Pujayanti menulis tentang kecenderungan menurunnya kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati di Indonesia, bahkan sebagian besar tengah mengalami kepunahan sebelum dimanfaatkan potensinya. Hal ini tidak saja menjadi masalah bagi Indonesia tetapi juga dunia. Bagaimana upaya dunia dan Indonesia untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan memanfaatkannya secara berkelanjutan menjadi permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.

Pada bagian *keempat* Lukman Adam membahas tentang manajemen perikanan yang berkelanjutan yang harus memerhatikan ekosistem pesisir yang berperan penting menunjang sumber daya ikan di daerah tersebut. Di

dalam analisisnya, penulis berpendapat bahwa paling tidak ada dua paradigma baru dalam pengelolaan kawasan konservasi perikanan, yaitu: 1) diatur dengan sistem zonasi, dan 2) kewenangan pengelolaan kawasan konservasi, baik Pemerintah dan pemerintah daerah. Kajian ini bertujuan untuk merumuskan manajemen perikanan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan memerhatikan faktor lingkungan (terutama ekosistem pesisir), ekonomi, dan sosial, melalui: pemetaan keragaan perikanan di Indonesia, dan melakukan analisis bioekonomik sumber daya ikan di Indonesia.

Pada bagian *kelima*, Dina Martiany membahas tentang masih adanya kesenjangan antara retorika dan praktik tentang peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan manusia, meskipun masyarakat internasional mengakui hal itu sebagai isu penting dalam pengelolaan sumber daya air. Di dalam analisisnya, Dina martiany berpendapat bahwa tanggung jawab untuk mengambil dan menyediakan air bersih di rumah tangga sebenarnya berada di tangan perempuan, akan tetapi laki-laki masih memegang kendali dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya air. Melihat pada kondisi seperti itu, maka keterlibatan peran perempuan dan pengintegrasian perspektif gender menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sumber daya air. Analisis dalam tulisan ini terfokus pada peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya air dan mengintegrasikan perspektif gender dalam pengelolaan sumber daya air.

Pada bagian *keenam*, Dinar Wahyuni membahas peran penting sektor pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Didalam analisisnya, Dinar Wahyuni berpendapat bahwa kebijakan impor pangan telah menyebabkan Indonesia rentan terhadap gejolak pangan dunia. Perubahan harga pangan global akan mempengaruhi kondisi pangan dalam negeri. Untuk mengatasi masalah tersebut, Dinar Wahyuni berpendapat bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dibarengi konservasi lingkungan. Untuk itu, upaya meningkatkan ketahanan pangan berkelanjutan dapat dilakukan melalui penguatan sumber daya lokal. Ketahanan pangan selain sebagai syarat pemenuhan hak azasi pangan rakyat juga merupakan pilar bagi kedaulatan bangsa. Pembangunan ketahanan pangan dilakukan dengan tetap memperhatikan konsep keberlanjutan. Kemampuan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan manusia terbatas sehingga perlu dilestarikan agar masa depan generasi penerus tidak akan terganggu.

Pada bagian *ketuju*, Mohammad Teja membahas tentang kaitan pola konsumsi masyarakat terhadap keberlanjutan lingkungan hidup di masa depan. Menurutnya, pola konsumsi berdampak terhadap keberlanjutan lingkungan yang hendak kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Karena itu,

agar pembangunan tetap berkelanjutan maka pola konsumsi masyarakat harus diubah. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa segala tindakan manusia tidak berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup jangka panjang bumi dan biosfer.

Pada bagian *kedelapan* dari buku ini, Teddy Prasetiawan membahas masalah perumahan yang dapat berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan. Analisis diarahkan kepada deskripsi tentang kebijakan bidang perumahan dalam rangka mengurangi jumlah permukiman kumuh, pengadaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang layak layak pada perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan yang perlu dikembangkan dalam menurunkan jumlah permukiman kumuh adalah dengan memajukan pembangunan permukiman yang berkelanjutan (*promoting sustainable human settlement development*). Upaya ini dapat dilakukan baik melalui pencegahan berkembangnya permukiman kumuh baru maupun peningkatan kualitas permukiman kumuh yang ada.

Bagian *kesembilan* buku ini Sita Hidriyah menulis tentang upaya pemerintah dan kerja sama luar negeri dalam pengentasan kemiskinan menuju pembangunan berkelanjutan. Analisisnya diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh dan Provinsi Kalimantan Tengah, serta kerjasama pemerintah Indonesia dengan luar negeri pada pengentasan kemiskinan dalam konteks pembangunan berkelanjutan

Kesembilan tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih lanjut kepada pembaca tentang dinamika implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Masalah telah terurai sementara penyelesaiannya juga telah tergambarkan secara jelas, kini upaya untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi dan ekologi global kembali ke masing-masing pihak apakah dalam perencanaan pembangunannya telah memuat komponen keberlanjutan.

Jakarta, November 2013  
Editor,

Humphrey Wangke





## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi .....	ix

### **BANTUAN LUAR NEGERI DI BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN**

<i>Lisbet</i> .....	1
BAB I    PENDAHULUAN.....	3
BAB II    METODOLOGI PENELITIAN.....	7
BAB III   POTENSI SUMBER ENERGI BARU TERBARUKAN DI INDONESIA.....	9
BAB IV    UPAYA DAN KENDALA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER ENERGI BARU TERBARUKAN .....	13
BAB V    BANTUAN LUAR NEGERI DI BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN .....	19
BAB VI    KESIMPULAN .....	21
DAFTAR PUSTAKA .....	23

### **IMPLEMENTASI PENGELOLAAN HUTAN SECARA BERKELANJUTAN MELALUI KERJA SAMA LUAR NEGERI**

<i>Humphrey Wangke</i> .....	25
BAB I    PENDAHULUAN.....	27
BAB II    METODOLOGI PENELITIAN.....	33
BAB III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	35
BAB IV    KESIMPULAN .....	49
DAFTAR PUSTAKA .....	51

### **ISU LINGKUNGAN GLOBAL DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA**

<i>Adirini Pujayanti</i> .....	55
BAB I    PENDAHULUAN.....	57
BAB II    PEMBAHASAN.....	63
BAB III   PENUTUP .....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	79

## **MANAJEMEN PERIKANAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA**

<i>Lukman Adam</i> .....	83
BAB I    PENDAHULUAN.....	85
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....	87
BAB III   KERAGAAN PERIKANAN DI INDONESIA.....	91
BAB IV    ANALISIS BIOEKONOMI SUMBER DAYA IKAN DI INDONESIA.....	97
BAB V    ALTERNATIF KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERIKANAN.....	103
BAB VI    SIMPULAN DAN SARAN.....	107
DAFTAR PUSTAKA .....	109

## **PERSPEKTIF GENDER DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)**

<i>Dina Martiany</i> .....	115
A.    PENDAHULUAN.....	115
B.    SUMBER DAYA AIR DALAM <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)</i> .....	118
C.    PERAN PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR .....	121
D.    PERSPEKTIF GENDER DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR .....	126
E.    PENUTUP .....	132
DAFTAR PUSTAKA .....	135

## **PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN MELALUI PENGUATAN SUMBER DAYA LOKAL**

<i>Dinar Wahyuni</i> .....	139
A.    PENDAHULUAN.....	139
B.    PERMASALAHAN.....	141
C.    KERANGKA PEMIKIRAN .....	142
D.    PASANG SURUT KETAHANAN PANGAN NASIONAL .....	146
E.    UPAYA PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN.....	150
F.    PENUTUP .....	160
DAFTAR PUSTAKA .....	163

**POLA KONSUMSI MASYARAKAT INDONESIA  
SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALI  
DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

<i>Mohammad Teja</i> .....	167
BAB I PENDAHULUAN.....	169
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	173
BAB III PEMBAHASAN.....	177
BAB IV PENUTUP .....	189
DAFTAR PUSTAKA .....	191

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM  
MENGATASI PERMASALAHAN PERMUKIMAN KUMUH**

<i>Teddy Prasetiawan</i> .....	193
BAB I PENDAHULUAN.....	195
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN.....	201
BAB III PEMBAHASAN.....	207
BAB IV PENUTUP .....	219
DAFTAR PUSTAKA .....	221

**UPAYA PEMERINTAH DAN KERJA SAMA  
LUAR NEGERI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN  
MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

<i>Sita Hidriyah</i> .....	223
BAB I PENDAHULUAN.....	225
BAB II METODOLOGI PENELITIAN.....	231
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH .....	233
BAB IV KESIMPULAN .....	245
DAFTAR PUSTAKA .....	247
Epilog.....	251
Tentang Penulis .....	254
Indeks.....	257

